



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

JL. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 8 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan perlu disusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399); Undang-Undang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5799);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 47 tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

Memperhatikan: Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026.
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : RENJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 08 Agustus 2025

Kepala,

Ir. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Selatan sebagai laporan
2. Kepala BAPPEDA- LITBANG Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 dapat kami selesaikan.

Amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 merupakan penjabaran tindak lanjut dari tugas pokok dan fungsi yang dimiliki kedalam bentuk program dan kegiatan. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 dalam mewujudkan percepatan pencapaian tujuan dan sasaran untuk pemanfaatan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2026 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan kami ke depan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 ini sampai dengan selesai.

Manna, Agustus 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi stabilitas nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin. Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui :

a) Pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) Pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) Pengembangan teknologi produksi pangan; d) Pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan diperlukan perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang matang. Perencanaan ini merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya informasi, iptek, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus-menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

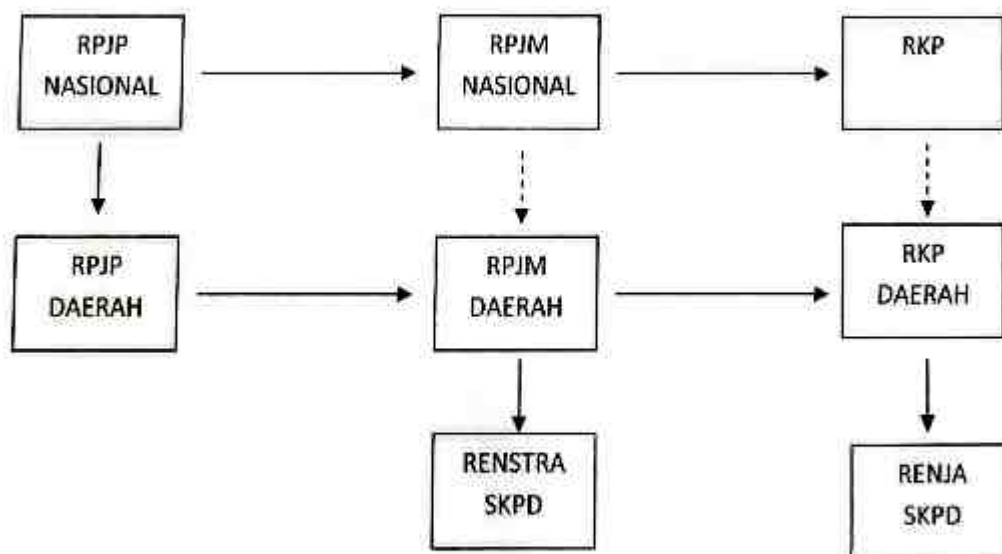
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Ketahanan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah pada percepatan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Renja SKPD sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahunan. Dalam rencana kerja memuat program dan kegiatan yang bersifat indikatif yang didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama waktu satu tahun.

Fungsi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan-tuntutan perkembangan lingkungan baik lokal, regional, nasional maupun global.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian Renja memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya, baik itu dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam skema berikut :

Bagan Keterkaitan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 47 tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2026.
2. Memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2026 menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan pangan tahun lalu dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.29.

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan s.d Tahun 2025 dibawah dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 yang tidak terealisasi antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
6. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal, Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal, Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Persentase Capaian realisasi terhadap target Renstra Program kegiatan pada RENJA 2025 yang dibawah 50% antara lain :

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian 8%;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian 16,67%;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian 50%;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan capaian 33,33%;
5. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan capaian 50%.

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SID TAHUN 2025

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SID TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SID TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2 09 01	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)	
2 09 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD, Persentase tindak lanjut LHP BPK, Indeks Kepuasan ASN	80,100%,85	60,11;100%; 80	80, 100%, 82,5	45,45; 100%; 80	56,81%; 100%; 80	80, 100%, 82,5	100%	80, 100%, 82,5	100
2 09 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100
2 09 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	60	30	10	10	100	10	50	50	83,33
2 09 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	3	1	1	100	1	5	5	83,33

2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	3	1	1	100	1	5	83,33
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Undak lanjut LHP BPK	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	180	90	20	20	100	30	140	77,78
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	3	1	1	100	1	5	83,33
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	3	1	1	100	1	5	83,33
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan kepegawalan ASN	85	80	82,5	82,5	100	82,5	80,8	95
2	09	01	2.06	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25	1	1	0	0	5	2	8
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan umum ASN	85	80	82,5	82,5	100	82,5	80,8	95
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	6	3	1	1	100	1	5	83,33

2	09	01	2.06	0006	Pengadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	disediakan	6	3	1	1	100	1	5	83.33
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	3	1	1	100	1	5	83.33
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah perangkat daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	0	1	3	100	0	3	75
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	8	3	6	100	6	14	100
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	3	1	1	100	1	5	83.33
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	3	1	1	100	1	5	83.33
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	40%	40%	40%	40%	100	40%	40%	100
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	180	90	30	30	100	30	150	83.33

2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	8	4	12	100	4	18	90
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	0	1	1	100	1	1	16,67
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pendukung ketersediaan cadangan pangan	55%	0	45%	0	0	45%	45%	81,82
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan yang disediakan	100%	NA	100%	0	0	100%	100%	100
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	8	4	1	0	0	1	4	50
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/konsumen	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	40%	48,5%	48%	47,84%	100%	45%	45%	88,88
2	09	03	2.01			Persentase pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100

2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang disediakan	6	0	1	1	1	100	1	2	33,33
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kabupaten/kota	6	3	1	1	1	100	1	5	83,33
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan distribusi pangan	6	3	1	1	1	100	1	5	83,33
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	6	3	1	1	1	100	1	5	83,33
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan daerah	18,75%	18,75%	100%	100%	100	100	18,75%	18,75	100
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	6	1	1	0	0	0	1	3	50
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	71500	40000	27350	23355	100	100	12000	65855	97,69
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Harga minimum daerah untuk pangan lokal	4.000/kg	4000/kg	4000/kg	4000/kg	100	100	4000/kg	4000/kg	100
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	6	2	1	1	1	100	1	3	50
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi pangan perkapita/hari	280 gr/kap/hr	275,3	280 gr/kap/hr	271,9	100	100	271,9 gr/kap/hr	271,9 gr/kap/hr	100

2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	6	3	1	1	1	100	1	5	83,33
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	6	3	1	1	1	100	1	5	83,33
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12%	20,69%	12%			100	15,79%	15,79%	100
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase peta FSVA yang tersusun	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan	5	2	1	1	1	100	1	4	80
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelalaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	6	3	1	1	1	100	1	5	83,33
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	70,59	80%	89,65%	89,65%	100	89,65%	89,65%	100

2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	6	3	1	1	100	1	100	83,33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pada bidang Ketahanan Pangan terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar dengan 4 (empat) indikator. Untuk dapat melaksanakan target pencapaian dan penerapan SPM bidang Pangan hanya 1 organisasi perangkat daerah sebagai penanggung jawab di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 4 (empat) indikator bidang ketahanan pangan. Keempat indikator tersebut merupakan output pelayanan dasar dari Dinas Ketahanan pangan berupa :

1. Penguatan cadangan pangan, indikator standar pelayanan dari pelayanan dasar ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Ketersediaan informasi, pasokan dan akses pangan, indikator standar pelayanan dari pelayanan dasar distribusi dan akses pangan.
3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan indikator standar pelayanan dari pelayanan dasar panganekaragaman dan keamanan pangan.
4. Penanganan daerah rawan pangan indikator standar pelayanan dari pelayanan dasar penanganan kerawanan pangan.

Untuk lebih jelas setiap jenis layanan dan indikator bidang Ketahanan Pangan terhadap target dan kondisi capaian SPM (standar pelayanan mutu Standar Nasional) tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut ini :

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI			Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13
1	Penguatan Cadangan Pangan	82	87	83	83	83	83	82	82	82	82	83	84	84	-
2	Ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	84	87	84	84	84	84	80	80	81	84	85	85	85	-
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	86	87	87	87	87	87	86	86	86	87	87	87	87	-
4	Penanganan daerah rawan pangan	87	87	87	87	87	87	86	86	86	87	87	87	87	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Bengkulu Selatan. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:
 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - Belum terintegrasinya kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

- Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota:
 - Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
 - Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan balik (*feedback*) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan:
 - Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;
 - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan.

Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Bengkulu Selatan masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

3. Peningkatan Stabilitas Pasokan, Harga dan Distribusi Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut.

Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, dan belum efektifnya pengawasan keamanan pangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan pangan memiliki 5 program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan antara lain :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan 5 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 1.2 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - 1.3 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
 - 1.4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - 2.2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - 4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan, Pemuktahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Setelah dilakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan dan sumberdaya yang ada maka diusulkan untuk dilakukan perubahan program kerja yang diharapkan diakomodir dalam RKPD 2026, rencana program tersebut meliputi ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan 4 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 1.2 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - 1.3 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
 - 1.4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - 2.2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

- 4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan, Pemuktahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum, review terhadap Rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel T-C.31

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT.
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS KETAHANAN PANGAN											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	Nilai AKIP OPD, Persentase tindak lanjut LHP BPK, Indeks Kepuasan ASN	80; 100%; 85	4,883,101,792	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan	Nilai AKIP OPD, Persentase tindak lanjut LHP BPK, Indeks Kepuasan ASN	80; 100%; 85	4,883,101,792	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	100%	76,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	100%	76,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	40,000,000	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	6,000,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	30,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	30,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%	3,373,101,792	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%	3,373,101,792
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bln	3,291,101,792	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bln	3,291,101,792
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	76,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	76,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan	1 laporan	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan	1 laporan	6,000,000

Tahun SKPD	hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tahun SKPD	hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Administrasi Kependudukan Peringkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Administrasi Kependudukan Peringkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan
60,000,000	85	60,000,000	85
Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian ASN	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
30 paket	30 paket	30 paket	30 paket
30,000,000	5 orang	30,000,000	5 orang
Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
299,000,000	85	299,000,000	85
Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
5,000,000	1 paket	5,000,000	1 paket
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	4,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	4,000,000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	31,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	31,000,000
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	9,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	9,000,000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 dokumen	50,000,000
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	200,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	100%	150,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	100%	150,000,000

15	Pengadaan Mebel	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah unit mebel yang disediakan	5 unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah unit mebel yang disediakan	5 unit	50,000,000
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	100,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	170,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	170,000,000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	1 laporan	40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	1 laporan	40,000,000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	130,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	130,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	40%	155,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	40%	155,000,000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	30 unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	30 unit	100,000,000

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	15.000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinas Ketahanan Pangan
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	40.000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kab. BS	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung ketersediaan cadangan pangan	55%	100.000,000	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kab. BS
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase infrastruktur dan pendukung cadangan pangan yang disediakan	100%	100.000,000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. BS

20	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah infrastruktur cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang tersedia	1 unit	100,000,000	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah infrastruktur cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang tersedia	1 unit	100,000,000
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kab. BS	Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/ konsumen Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100% 40%	350,000,000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kab. BS	Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/ konsumen Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100% 40%	350,000,000
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. BS	Persentase pemantauan pasokan dan harga pangan	80%	125,000,000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. BS	Persentase pemantauan pasokan dan harga pangan	80%	125,000,000

21	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. BS	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan	50,000,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. BS	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan	50,000,000
22	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kabupaten/kota	1 laporan	35,000,000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kabupaten/kota	1 laporan	35,000,000
23	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4 unit	20,000,000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4 unit	20,000,000
24	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. BS	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. BS	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	20,000,000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase cadangan pangan daerah	18,75%	95,000,000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase cadangan pangan daerah	18,75%	95,000,000
25	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 dokumen	15,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 dokumen	15,000,000

26	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	12 ton	80,000,000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	12 ton	80,000,000
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Kab. BS	Harga minimum daerah untuk pangan lokal (umbi-umbian)	4.000/kg	15,000,000	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Kab. BS	Harga minimum daerah untuk pangan lokal (umbi-umbian)	4.000/kg	15,000,000
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1 laporan	15,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1 laporan	15,000,000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. BS	Jumlah konsumsi pangan perkapita/hari	280 gr/kap/hr	115,000,000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. BS	Jumlah konsumsi pangan perkapita/hari	280 gr/kap/hr	115,000,000
28	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 dokumen	15,000,000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 dokumen	15,000,000

Pangan perkapita/tahun	Kab. BS	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	100,000,000	Pangan perkapita/tahun	Kab. BS	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	100,000,000	
29	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. BS	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	100,000,000	Pangan perkapita/tahun	Kab. BS	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	100,000,000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. BS	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12%	115,000,000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. BS	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12%	115,000,000
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	100%	15,000,000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	100%	15,000,000
30	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan	1 dokumen	15,000,000	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan	1 dokumen	15,000,000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	Kab. BS	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	100,000,000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	Kab. BS	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	100,000,000

41

Kabupaten/Kota						Kab/Kota					
31	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	100,000,000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	100,000,000	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kab. BS	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	35,000,000	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kab. BS	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	35,000,000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Kab. BS	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	35,000,000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Kab. BS	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	35,000,000	
32	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal	Kab. BS	Jumlah sarana pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	35,000,000	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan	Kab. BS	Jumlah sarana pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	35,000,000	

42

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	daerah kabupaten/kota	Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	daerah kabupaten/kota		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- 2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 5) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tupoksi yang telah ditetapkan dalam Perda Bengkulu Selatan No. 09 Tahun 2016 yaitu bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan beberapa program kerja dan rencana kerja pembangunan yang menunjang kebijakan nasional terutama masalah pembangunan ketahanan pangan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu *"terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis pada sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani"*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran target kinerja ini merupakan acuan dalam pencapaian misi pembangunan Ketahanan Pangan kabupaten Bengkulu Selatan yaitu mewujudkan Kedaulatan pangan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : "Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat"

Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Adapun tujuan disusunnya rencana kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2026. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu semua yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat, dengan indicator sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan periode tahun 2021-2026, dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS”***. Dimensi yang terkandung dalam kalimat “EMAS” yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Program prioritas kepala dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya adalah :

1. Penguatan sektor unggulan pembentuk PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan
 - a. Pengembangan inovasi untuk peningkatan produksi pada sektor pertanian, salah satunya melalui PATEN
 - b. Pengembangan inovasi untuk peningkatan produksi pada sektor perikanan
 - c. Pengembangan kawasan agrominapolitan sebagai desa mandiri
2. Pengembangan industry pengolahan sebagai penguat pondasi ekonomi
 - a. Menumbuhkan kawasan industry berbasis kearifan lokal
 - b. Memberdayakan UMKM

3. Pembangunan Kerjasama Kawasan Ekonomi Regional Pagar Alam-Lahat-Manna (PALM)
 - a. Peningkatan akses konektivitas sebagai jalur transportasi, jalur distribusi, dan jalur pertahanan keamanan
 - b. Peningkatan upaya mitigasi bencana
 - c. Penguatan kelembagaan kerjasama sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata.

Untuk mendukung pemerintah daerah mewujudkan visi/misi tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun program kerja dan rencana kerja yang mengacu pada program prioritas kepala daerah. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 5 program yang terdiri dari 1 program rutin dan 4 program prioritas yang menjadi indikator utama keberhasilan program, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan sasaran program yaitu terkelolanya sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran program yaitu terwujudnya stabilitas harga pangan dan meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam.
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran program yaitu tertanganinya kerawanan pangan daerah.
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program yaitu terawasinya keamanan pangan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :

- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan 4 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 1.2 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - 1.3 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
 - 1.4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - 2.2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

- 4) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - 4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan, Pemuktahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026, terlampir.

BAB V PENUTUP

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat terus memfasilitasi penanganan kerawanan pangan, pengadaan cadangan pangan daerah, dan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal baik melalui dana APBD maupun dana APBN.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting.

Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran program prioritas Tahun 2026, Kabupaten Bengkulu Selatan mengharapkan dukungan semua pihak terutama pada aspek manajemen, dimana perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.

Terwujudnya perencanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh Pemerintah Daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan ketahanan pangan dan terjalinnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan daerah sehingga terwujudlah masyarakat Bengkulu Selatan EMAS.

Manna, Agustus 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan


Ir. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
JL. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 6 Tahun 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan perlu disusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 47 tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

Memperhatikan: Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang susunan keanggotaannya seperti tertera pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 2) Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 3) Menganalisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- 4) Melakukan Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan serta mengestimasi target/sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 30 Januari 2025



Ir. SUSMANTO, MM

NIP. 19680814 200212 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Selatan sebagai laporan
2. Kepala BAPPEDA- LITBANG Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 10 Tahun 2025
TANGGAL : 30 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3.	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Anggota
4.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
5.	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
6.	Staf	Anggota

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2026**

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh :

1. Dinas Ketahanan Pangan
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026
2. Pagu indikatif program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026

Peserta verifikasi rancangan rencana kerja organisasi perangkat daerah tahun 2026,

Menyepakati :

- Kesatu : rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- Kedua : pagu indikatif rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026
- Ketiga : pagu indikatif program dan kegiatan pada lampiran berita acara ini merupakan bahan pertimbangan pada tahap pembahasan selanjutnya.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

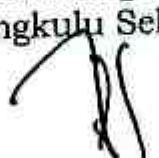
Kepala
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan


Ir. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

Manna, 6 Mei 2025,
Kepala Bidang PSI
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan


Dwi Priandona, ST, ME
NIP. 19850616 202001 1 014

Kepala Bidang P2EPD
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan


Nusadian Esa Putra, ST, ME
NIP. 19830703 200901 1 005

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026

Hasil Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 :

1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra
2. Program Prioritas Tahun 2026

A. Penanganan Stunting

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local, Target 1 Laporan
Pagu Anggaran Rp. 100.000,000,-

B. Penanggulangan Kemiskinan

1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota,
Target 12 Ton Beras Pagu Anggaran 80.000.000,-

C. Kegiatan Prioritas OPD

1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota, Pagu Rp. 100.000.000,- Target 1 Dokumen
3. Pagu indikatif rancangan Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 4.883.101.792,-

Kepala
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan


Ir. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

Manna, 6 Mei 2025
Kepala Bidang PSI
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan


Dwi Prian Dona, ST, ME
NIP. 19850616 202001 1 014

Kepala Bidang P2EPD
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan


Nusadian Esa Putra, ST, ME
NIP.19830703 200901 1 005

TAHUN 2026

Environ Monit Assess (2008) 142:111–120

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PRIORITAS CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KENYANGKALAN PENCAPAIAN							KELUFAK BAGIAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PEMANGKAT DAERAH PENANGKALAN JAWAB
							TARGET 2023	PADU INDIKATIF (R/R)		LOKASI	BUMBER DANA	PRIORITAS					
								1	2			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PADU INDIKATIF (R/R)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Evaluasi Admest Perangul Daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pangkajene Selatan, Sempu Kecamatan, Sempu Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Berpikir Nasional (P Pengembangan P. Kesehatan Yang Integral) Das Kompetensi) Das Ekonomi Pengelolaan Pencapaian di Tida Kecda Per walaupun dan Socias Te Berbasis Te ologi inf ormasi			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Peningkat Daerah	-	-			-	2.471.201.792,00			-	4. Inovasi dan Tida Kecda Per walaupun Pengelolaan Pencapaian di Tida Kecda Per walaupun dan Socias Te Berbasis Te ologi inf ormasi		-	3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.0001	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Membayar Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan				3.414.741.792,00	Kab. Pangkajene Selatan, Sempu Kecamatan, Sempu Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tida Kecda Per walaupun Pengelolaan Pencapaian di Tida Kecda Per walaupun dan Socias Te Berbasis Te ologi inf ormasi		-	3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.0002	Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA CPD	REVISI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2024	PRAKIRAAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCAPAIAN						KELONGKORAN SALINAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PESALINAN PENGALIHAN PANGKALAN
							TARGET 2023	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DAYA	MANUSIA	DEWASA		TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
1	3			5	6	7	1 Dokumen	31.393.000,00	Kab. Bangkulu Solomon, Sumba Korint 2024 Sumba Koro 2024	DATA ALOKASI JILM (DAG)	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran dan Pengukuran Tugor A 24													DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09.01.2.02.0003	Koordinasi dan Pengawasan Lapangan Keuangan Antar Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Antar Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Lapangan Keuangan Antar Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangkulu Solomon, Sumba Korint 2024 Sumba Koro 2024	DATA ALOKASI JILM (DAG)						DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Pusat dan Daerah						58.000.000,00								DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09.01.2.05.0002	Pengalaman Pukutan Dinas bersama Akutal Kabupaten	Jumlah Pukutan Dinas bersama Akutal Kabupaten				30 Pukutan	72.300.000,00	Kab. Bangkulu Solomon, Sumba Korint 2024 Sumba Koro 2024	DATA ALOKASI JILM (DAG)						DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKSI PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN RENCANA TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2023	PELAKSANAAN CAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMANGKATAN PENJAJARAN						PELAKSANAAN RENCANA TAHUN 2023		PELAKSANAAN RENCANA TAHUN 2023	
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TANGGAL PELAKSANAAN		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.00.01.2.07		Pengelolaan Bawahan Daerah Perikanan dan Kelautan						151.000.000,00							151.000.000,00	Dinas KLT dan Kelautan
2.00.01.2.07.005			Jumlah Pula' Mene yang Didukung	5 Unit				50.000.000,00	Kec. Biringgala, Kecamatan Biringgala, Kecamatan Biringgala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					50.000.000,00	Dinas KLT dan Kelautan
2.00.01.2.07.006			Jumlah Unit Pemukiman dan Monev Lainnya yang Didukung	8 Unit				51.000.000,00	Kec. Biringgala, Kecamatan Biringgala, Kecamatan Biringgala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					101.000.000,00	Dinas KLT dan Kelautan
2.00.01.2.08		Pengelolaan Jasa Perikanan dan Perikanan Lainnya						104.541.000,00							104.541.000,00	Dinas KLT dan Kelautan
2.00.01.2.08.002																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2024	PENCAPAIAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KESANGKAPAN PENCAPAIAN					KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PENCAPAIAN GABUNG PENCAPAIAN MAJU RENCANA
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengadaan Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperoleh	1 Laporan			1 Laporan	51.741.000.000	Kab. Bengkulu Sulawesi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4. Inovasi dan Tera Karya Pem Tumbuhan Tumbuhan di Tera Karya Pem Tumbuhan dan Berbasis Te Karya Pem Tumbuhan		44.000.000.000	DINAS KETANAN RANGKAI
2	06.01.2.06.004	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengadaan Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperoleh	1 Laporan			1 Laporan	112.000.000.000	Kab. Bengkulu Sulawesi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4. Inovasi dan Tera Karya Pem Tumbuhan Tumbuhan di Tera Karya Pem Tumbuhan dan Berbasis Te Karya Pem Tumbuhan		143.000.000.000	DINAS KETANAN RANGKAI
3	06.01.2.06	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengadaan Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperoleh	1 Laporan			1 Laporan	142.000.000.000	Kab. Bengkulu Sulawesi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4. Inovasi dan Tera Karya Pem Tumbuhan Tumbuhan di Tera Karya Pem Tumbuhan dan Berbasis Te Karya Pem Tumbuhan		175.000.000.000	DINAS KETANAN RANGKAI
4	06.01.2.06.001	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengadaan Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperoleh	1 Laporan			1 Laporan	98.000.000.000	Kab. Bengkulu Sulawesi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4. Inovasi dan Tera Karya Pem Tumbuhan Tumbuhan di Tera Karya Pem Tumbuhan dan Berbasis Te Karya Pem Tumbuhan		143.000.000.000	DINAS KETANAN RANGKAI
5	06.01.2.06.005	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengadaan Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperoleh	1 Laporan			1 Laporan	98.000.000.000	Kab. Bengkulu Sulawesi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4. Inovasi dan Tera Karya Pem Tumbuhan Tumbuhan di Tera Karya Pem Tumbuhan dan Berbasis Te Karya Pem Tumbuhan		143.000.000.000	DINAS KETANAN RANGKAI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIC REPORTING OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PIKIRAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN MERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	REKAMAN MAJU MENCAHA TAHUN 2027		PEMANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4 Jumlah masyarakat Desa yang terdampak banjir di Desa yang terdampak banjir	5	6	7	1 unit	0,00	Kab. Bangkulu Sulawesi Tengah Sungai Koro	DANA ALOKASI JUMUD CACI	12	13 1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat	15	145.000.000,00	DINAS KETANAKBUD PANGAN	
3	2.40.02	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						338.000.000,00						338.000.000,00		
	2.00.02.2.01	Penyediaan dan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stokisasi Pangan dan Harga Pangan						140.000.000,00				3 Penguatan kesehatan dan Tercakupnya masyarakat dengan akses pangan dan gizi		137.000.000,00	DINAS KETANAKBUD PANGAN	
2	2.00.02.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rangin Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terpadu				1. Lahan	50.000.000,00	Kab. Bangkulu Sulawesi Tengah Sungai Koro	DANA ALOKASI JUMUD CACI		3 Penguatan kelembagaan dan Tercakupnya masyarakat dengan akses pangan dan gizi		55.000.000,00	DINAS KETANAKBUD PANGAN	
2	2.00.02.2.01.0008	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJET AKHIR PERIODE RENCANA TAHUN OFD	REVISI CAPAIAN RENCANA OFD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OFD TAHUN 2025	CAPAIAN KUALITAS DAN KEMAMPUAN PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MALU RENCANA TAHUN 2027		PERAKHIRAN TAMBAHAN PENDANAAN JAWAB
							TARGET 2025	PADJINDHATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kegiatan Subkegiatan Pengukuran dan Pengukuran Kegiatan Pengukuran dan														

Survei dan ... 2024 ... 2024 ... 2024 ...

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PENSTANA OPD	REALISASI CAPAIAN BELAKA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET BELAKA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN MINERJA DAN KETANGKAPAN PENANAMAN					KELompok	PRAKIRAN MAJU PENGUSAHA TAHUN 2027		PENGANGKAT DESKAM PENANAMAN JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.06.03.2.04	2.06.03.2.04	Realisasi Perencanaan Target Ketersediaan Pangan Perkotaan/Perdesa sesuai dengan Angka Ketersediaan Gizi						115.000.000,00				3		125.000.000,00	17
2.06.03.2.04.0001	2.06.03.2.04.0001	Pengadaan dan Penyalangan Target Ketersediaan Pangan Per Kota Per Tahun	Target Ketersediaan Pangan Per Kota Per Tahun				1 Desember	10.000.000,00	Kat. Bilingual, Kertas, Sema, Sema KADASA	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3		15.500.000,00	DINAS KETANGKAPAN PANGAN
2.06.03.2.04.0002	2.06.03.2.04.0002	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengonsumsi Pangan Konsumsi Pangan Bersama Sunda Caya Lohar	Jumlah Pembudayaan Masyarakat Masyarakat dalam Pengonsumsi Pangan Konsumsi Pangan Bersama Sunda Caya Lohar	1 Laboran				100.000.000,00	Kat. Bilingual, Kertas, Sema, Sema KADASA	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2		110.000.000,00	DINAS KETANGKAPAN PANGAN
2.06.04	2.06.04	PROGRAM PENANGANAN KEMAMPUAN PRAGAU						110.000.000,00						125.500.000,00	
2.06.04.2.04	2.06.04.2.04	Pertumbuhan Peta Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan Kecamatan						20.000.000,00				3		18.000.000,00	DINAS KETANGKAPAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRADA TAHUN 2024	PROGRES CAPAIAN TARGET RESTRADA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KENDARAAN PENGAWASAN										KELOMPOK SASARAN		PENCAPAIAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PENCAPAIAN RESTRADA TAHUN 2027
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
											NASIONAL	DAERAH									
																12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemantauan dan Analisis Pola Kehidupan dan Kebutuhan Pangan	Peta dan Analisis Kehidupan dan Kebutuhan Pangan yang Disesuaikan	1. Dukung	30.000.000,00	Kab. Bangkulu Selatan, Selatan Kecamatan Sempu Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					3				16.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2.09.04.2.02	Peningkatan Kewenangan Pengelolaan Pangan Kabupaten Kota					110.000.000,00					2					110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN			
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengolahan, dan Penyajian Makanan pada Kewenangan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengolahan, dan Penyajian Makanan pada Kewenangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	1. Dukung	110.000.000,00	Kab. Bangkulu Selatan, Selatan Kecamatan Sempu Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					2					110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN			
5	2.09.04	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					37.500.000,00										37.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN			
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota					37.500.000,00					3					37.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN			

CS Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

10.1017/S0022292412001849